

# ■ RANGKUMAN MATERI PPKN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan — SMK Semua Jurusan

## BAB 2 : UUD 1945 DAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Slide 1 Pengantar

Slide 2 Sistematika UUD

Slide 3 Amandemen

Slide 4 Lembaga Negara

### Pengantar

Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara yang mengatur dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)**. UUD 1945 merupakan perwujudan kesepakatan tertinggi bangsa dan menjadi landasan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

### ■ Fakta Penting Bab 2

■ Nama Resmi	UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
■ Disahkan	18 Agustus 1945 oleh PPKI
■ Kedudukan	Hukum tertinggi (supreme law) di Indonesia
■ Jumlah Pasal	37 pasal (setelah 4x amandemen: 73 pasal + 3 pasal aturan)
—■ Amandemen	4 kali amandemen (1999, 2000, 2001, 2002)
■ Hierarki Hukum	UUD 1945 → TAP MPR → UU → PP → Perpres → Perda

### Sejarah Berlakunya Konstitusi di Indonesia

Konstitusi	Periode	Keterangan
UUD 1945	18 Agt 1945 – 27 Des 1949	Konstitusi pertama RI. Bersifat sementara karena dibuat dalam kondisi darurat.
Konstitusi RIS	27 Des 1949 – 17 Agt 1950	Berlaku saat Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) hasil KMB.
UUDS 1950	17 Agt 1950 – 5 Jul 1959	Berlaku saat kembali ke NKRI. Sistem parlementer. Berakhir dengan Dekrit Presiden.

UUD 1945 (asli)	5 Jul 1959 – 19 Okt 1999	Kembali berlaku lewat Dekrit Presiden Soekarno. Dipakai hingga era Reformasi.
UUD NRI 1945 (Amandemen)	19 Okt 1999 – Sekarang	UUD 1945 setelah 4x amandemen. Berlaku hingga sekarang sebagai konstitusi RI.

## Slide 2 — Sistematika & Isi UUD NRI 1945

### Struktur UUD NRI 1945

UUD NRI 1945 terdiri atas **Pembukaan (Preamble)** dan **Batang Tubuh**. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena memuat dasar filosofis negara.

PEMBUKAAN (PREAMBULE)	BATANG TUBUH
<p><b>Terdiri dari 4 alinea:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Alinea I</b> — Pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa</li><li>• <b>Alinea II</b> — Pengakuan perjuangan bangsa Indonesia</li><li>• <b>Alinea III</b> — Pernyataan kemerdekaan Indonesia</li><li>• <b>Alinea IV</b> — Tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara (Pancasila)</li></ul>	<p><b>Terdiri dari:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 21 Bab</li><li>• 73 Pasal (setelah amandemen)</li><li>• 3 Pasal Aturan Peralihan</li><li>• 2 Ayat Aturan Tambahan</li></ul> <p>Mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara: HAM, kekuasaan negara, wilayah, dll.</p>

### 4 Tujuan Negara Indonesia (Pembukaan UUD Alinea IV)

1. <b>Melindungi</b> segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. <b>Memajukan</b> kesejahteraan umum.
3. <b>Mencerdaskan</b> kehidupan bangsa.
4. <b>Ikut melaksanakan</b> ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

### Pasal-Pasal Penting dalam UUD NRI 1945

Pasal	Isi Pokok
<b>Pasal 1</b>	Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik. Kedaulatan di tangan rakyat.
<b>Pasal 27</b>	Persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak.
<b>Pasal 28A-J</b>	Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara.
<b>Pasal 29</b>	Negara berdasarkan Ketuhanan YME. Negara menjamin kebebasan beragama.
<b>Pasal 30</b>	Hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
<b>Pasal 31</b>	Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Negara wajib membiayai pendidikan dasar.
<b>Pasal 33</b>	Perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang produksi dikuasai negara.

**Pasal 34**

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

## Slide 3 — Amandemen UUD 1945

### Pengertian & Tujuan Amandemen

Amandemen adalah perubahan resmi terhadap isi UUD dengan tetap mempertahankan naskah aslinya. Indonesia telah melakukan **4 kali amandemen UUD 1945** pada era Reformasi (1999–2002) oleh MPR. Tujuan amandemen adalah menyempurnakan aturan dasar agar lebih demokratis, menjamin HAM, dan membatasi kekuasaan presiden.

Amandemen	Tahun	Sidang MPR	Perubahan Pokok
I	1999	14–21 Okt 1999	Membatasi kekuasaan Presiden. Hak DPR diperkuat. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21 diubah.
II	2000	7–18 Agt 2000	Pemerintahan daerah, wilayah negara, warga negara, HAM (Pasal 28A-J), pertahanan keamanan.
III	2001	1–9 Nov 2001	Bentuk & kedaulatan negara, MPR, Presiden/Wapres, keuangan negara, MK, KY, BPK.
IV	2002	1–11 Agt 2002	DPD, Pemilu, pendidikan, perekonomian, kesejahteraan sosial. Komisi Pemilihan Umum (KPU).

### Perbandingan Sebelum & Sesudah Amandemen

Aspek	Sebelum Amandemen	Sesudah Amandemen
Masa Jabatan Presiden	Tidak dibatasi — bisa dipilih terus	Maksimal 2 periode (10 tahun)
Pemilihan Presiden	Dipilih oleh MPR	Dipilih langsung oleh rakyat (sejak 2004)
DPR	Kekuasaan lemah, mudah dibubarkan	Kekuasaan kuat, fungsi legislasi diperkuat
Lembaga Baru	Tidak ada MK, KY, DPD	Dibentuk MK, KY, DPD
HAM	Belum diatur rinci	Diatur lengkap di Pasal 28A–28J
BPK	Kurang independen	Lebih independen, diperkuat fungsinya

## Slide 4 — Lembaga-Lembaga Negara berdasarkan UUD NRI 1945

### Lembaga Negara Utama

Pasca amandemen UUD 1945, terjadi perubahan besar pada struktur lembaga negara. Tidak ada lagi lembaga 'tertinggi' — semua lembaga negara berkedudukan sejajar dan saling mengawasi (**checks and balances**).

Lembaga	Fungsi Utama	Dasar Hukum
MPR	Mengubah & menetapkan UUD. Melantik Presiden/Wapres. Memberhentikan Presiden.	Pasal 2–3
DPR	Membentuk UU. Menetapkan APBN. Fungsi pengawasan pemerintah.	Pasal 19–22B
DPD	Mengajukan RUU terkait daerah. Mengawasi pelaksanaan UU otonomi daerah.	Pasal 22C–22D
Presiden	Kepala negara & pemerintahan. Panglima tertinggi TNI. Membentuk kabinet.	Pasal 4–16
MA	Mahkamah Agung — puncak peradilan umum, agama, militer, dan TUN.	Pasal 24A
MK	Mahkamah Konstitusi — menguji UU terhadap UUD. Memutus sengketa Pemilu.	Pasal 24C
KY	Komisi Yudisial — menjaga kehormatan dan perilaku hakim.	Pasal 24B
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan — memeriksa pengelolaan keuangan negara.	Pasal 23E–23G

### Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

★ UUD NRI 1945	Hukum tertinggi — tidak boleh ada peraturan yang bertentangan
■ TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
■ Undang-Undang (UU) / Perppu	Dibuat oleh DPR bersama Presiden
■ Peraturan Pemerintah (PP)	Dibuat Presiden untuk melaksanakan UU
■ Peraturan Presiden (Perpres)	Dibuat Presiden untuk urusan tertentu
■ Perda Provinsi	Peraturan Daerah tingkat Provinsi
■ Perda Kab/Kota	Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota

#### ■ Kesimpulan & Nilai yang Dipetik

✓ UUD 1945 adalah **kontrak sosial tertinggi** bangsa Indonesia — wajib dipahami setiap warga negara.

- ✓ Amandemen membuktikan bahwa konstitusi dapat berkembang mengikuti kebutuhan zaman secara demokratis.
- ✓ Sebagai pelajar SMK, pahami hak-hakmu yang dijamin UUD — terutama **hak atas pendidikan (Pasal 31)** dan hak atas pekerjaan (Pasal 27).